

ABSTRAK

PENGARUH PENGETAHUAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP HUBUNGAN KUALITAS ANGGARAN DENGAN EFEKTIVITAS PENGAWASAN ANGGARAN (Studi Empiris pada DPRD Kabupaten & Kota Se-Provinsi Lampung)

Oleh

Nurbaiti

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas anggaran (kejelasan, keakuratan dan evaluasi anggaran) terhadap efektivitas pengawasan anggaran dan pengaruh pengetahuan tentang anggaran sebagai variabel moderating dalam hubungan antara kualitas anggaran dan efektivitas pengawasan anggaran. Dengan objek penelitian meliputi DPRD kabupaten/kota se-provinsi Lampung.

Teknik pemilihan sampel menggunakan *metode purposive sampling*. Data diperoleh dari anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten/kota yang menjadi sampel. Metode untuk menganalisis pada hipotesis pertama dalam penelitian ini diuji dengan regresi linier berganda sedangkan untuk hipotesis kedua menggunakan uji selisih mutlak.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas anggaran tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengawasan anggaran. Sedangkan hasil uji selisih mutlak menunjukkan bahwa variabel pengetahuan tentang anggaran bukan sebagai variabel moderating dalam hubungan antara kualitas anggaran terhadap efektivitas pengawasan anggaran.

Kata kunci: kualitas anggaran, kejelasan anggaran, keakuratan anggaran, evaluasi anggaran, efektivitas pengawasan anggaran, pengetahuan anggaran.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerapan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan peluang bagi perubahan pembangunan nasional yang berdasarkan pemerataan pembangunan menjadi pembangunan yang adil dan berimbang antara pusat dan daerah. Dengan adanya kebijakan otonomi daerah membuka peluang pemerintah daerah untuk dapat melakukan pembangunan dengan mandiri di setiap daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004 menyebabkan perubahan manajemen keuangan daerah. Salah satu perubahan tersebut yaitu dilakukan *budgeting reform* atau reformasi penganggaran yang meliputi proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. Reformasi penganggaran ini merupakan perubahan dari *traditional budget* atau penganggaran konvensional ke *performance budget* atau yang biasa disebut *New Public Management*. Model *New Public Management* berorientasi pada kinerja, bukan berorientasi kebijakan.

Sehingga pendekatan kinerja diperkenalkan untuk mengatasi kelemahan yang ada di dalam anggaran tradisional, terutama kelemahan dimana tidak ada tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja pencapaian tujuan dan sasaran dalam pelayanan publik. Pendekatan kinerja suatu organisasi lebih memperhatikan kinerja dibandingkan penghematan biaya dan juga mengutamakan mekanisme penentuan dan pembuatan prioritas tujuan serta pendekatan yang sistematis dan rasional dalam proses pengambilan keputusan.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan pelaksanaan otonomi daerah yang menuntut reformasi anggaran dari *traditional budgeting* ke *performance budgeting* secara logis menyebabkan perubahan manajemen keuangan daerah. Pada intinya perubahan menuntut adanya anggaran yang berkualitas dan

berbasis kinerja. Namun anggaran berkualitas belum dapat menjamin keberhasilan pencapaian pembangunan ekonomi daerah dan pelayanan publik secara menyeluruh tanpa adanya pengendalian. Pengawasan selalu berkaitan dengan pengukuran kinerja atau pencapaian tujuan. Anggaran saat ini telah digunakan sebagai standar dalam pengukuran evaluasi kinerja, sehingga pengawasan dapat dipengaruhi oleh kualitas anggaran karena dalam proses pengawasan pelaksanaan anggaran akan selalu dibandingkan antara anggaran dan fakta.

Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD harus dilakukan sedini mungkin yaitu sejak tahap perencanaan, tidak hanya pada tahap pelaksanaan dan pelaporan saja. Untuk mengoptimalkan pengawasan APBD, DPRD dituntut memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai konsep anggaran kinerja dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan APBD (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Surat Edaran, dan lain-lain) dan bagaimana pengaplikasiannya dalam perancangan APBD. Selain itu pengetahuan tentang anggaran sangat berhubungan dengan mekanisme penyusunan dan penetapan APBD yang pada masing-masing tahapan masih memiliki banyak kelemahan untuk mendapatkan perencanaan dan penetapan yang didukung oleh proses penganggaran yang menerapkan uji kewajaran, uji relevansi dan uji validitas data yang digunakan untuk menyusun anggaran. Sehingga penulis tertarik menganalisis penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Tentang Anggaran Terhadap Hubungan Antara Kualitas Anggaran Dan Efektivitas Pengawasan Anggaran”**.

1.2 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini dilakukan batasan masalah agar masalah yang diteliti tidak meluas. Maka batasan masalah tersebut adalah:

1. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten & Kota se-Provinsi Lampung.
2. Penyebaran kuesioner dilakukan kepada seluruh anggota Badan Anggaran DPRD pada Pemerintah Kabupaten & Kota se-Provinsi Lampung.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah kualitas anggaran (APBD) berpengaruh terhadap pengawasan anggaran yang dilakukan oleh DPRD, dan apakah pengaruh pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran mempengaruhi hubungan kualitas anggaran dan pengawasan anggaran.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan pokok yang telah dikemukakan di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui :

- a. Pengaruh kualitas anggaran terhadap efektivitas pengawasan anggaran yang dilakukan oleh DPRD.
- b. Pengaruh pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran terhadap hubungan antara kualitas anggaran dan efektivitas pengawasan anggaran oleh DPRD.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi akademisi, dapat menjadi informasi dan referensi bagi pembaca dan peneliti yang akan datang sehingga dapat menyempurnakan penelitian sejenis yang akan datang.
2. Bagi praktisi, agar hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam pembuatan kebijakan dimasa yang akan datang oleh Pemerintah Kota dan Kabupaten di Propinsi Lampung dalam perencanaan, penetapan, pelaksanaan dan pengawasan APBD.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Sistem Pengendalian Manajemen

Pengendalian manajemen menjadi suatu kewajiban dalam setiap organisasi untuk menjamin strategi yang dilaksanakan suatu organisasi dilakukan dengan efektif dan efisien. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyusunan anggaran atau penganggaran (*budgeting*) merupakan tahapan penting dalam proses pengendalian manajemen dan menjadi hal yang kritis dalam menjamin kegiatan suatu organisasi terlaksana dengan efektif dan efisien. Dengan kata lain kualitas anggaran suatu organisasi mempengaruhi pelaksanaan kegiatan dan pencapaian tujuan organisasi.

2.1.2 Teori Penetapan Tujuan (*Goal Setting-Theory*)

Berdasarkan teori penetapan tujuan ini yaitu seseorang akan melakukan usaha dan upaya sesuai dengan tujuan dari individu itu sendiri dan bagaimana tanggung jawab terhadap tujuan tersebut, sehingga pengawasan anggaran merupakan tanggung jawab bagi pihak yang diberi kekuasaan dalam mengawasi pelaksanaan anggaran tersebut.

2.1.3 Anggaran

Anggaran disebutkan sebagai alat perencanaan pencapaian tujuan yang dijelaskan oleh beberapa ahli berikut. Sehingga anggaran merupakan gambaran mengenai apa yang diharapkan, direncanakan, dan diperkirakan oleh suatu organisasi dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan, sebagai standar dalam penilaian kinerja, dan sebagai alat pengendalian pelaksanaan.

2.1.4 Anggaran Kinerja

Dengan pendekatan ini organisasi lebih memperhatikan aspek pencapaian kinerja dibandingkan dengan penghematan biaya semata. Anggaran pendekatan kinerja memiliki konsep *value for money* dan pengawasan atas kinerja output. Melalui proses anggaran kinerja diharapkan pemerintah akan mampu berorientasi pada efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas kinerja guna

menghasilkan *outcome* yang berkualitas tinggi, mampu memberdayakan dan memenuhi keinginan masyarakat, partisipatif, dan mampu mengestimasi kejadian di masa depan (Tjandra, 2009).

2.1.5 Fungsi Anggaran

Menurut Lubis (2010), anggaran adalah alat manajerial yang memastikan pencapaian target organisasional dan memberikan pedoman yang terperinci untuk operasi harian. Anggaran memiliki peranan sebagai alat komunikasi dan alat penilai kinerja yang objektif, sehingga setiap individu di dalam organisasi dapat mengetahui tujuan organisasi sehingga diharapkan dapat memotivasi kinerja para anggota organisasi. Suatu anggaran yang merupakan sistem pengendalian apabila dapat memenuhi kriteria akurat, rasional, dan terkendali maka pengawasan yang dilakukan oleh pihak pengawas akan lebih efektif.

2.1.6 Kualitas Anggaran

Kualitas merupakan konsep yang cukup sulit dipahami karena memiliki banyak interpretasi sehingga tidak dapat didefinisikan secara tunggal dan sangat tergantung pada konsepnya. Dikaitkan dengan konsep anggaran maka kualitas anggaran merupakan kemampuan dari karakteristik anggaran secara tepat menginterpretasikan pencapaian standart atau target yang diharapkan. Sehingga kualitas anggaran (APBD) diukur dari kemampuan karakteristik yaitu kejelasan, keakuratan, dan sejauh mana pengevaluasian dapat menunjukkan anggaran dapat melihat pencapaian target atau kondisi dapat terpenuhi sesuai yang direncanakan dalam suatu anggaran.

2.1.7 Pengawasan Anggaran

UU No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD pasal 344 ayat (1) huruf c juga disebutkan bahwa DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. Ini adalah hak yang strategis bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Sehingga DPRD mempunyai posisi, tugas dan fungsi yang penting dan luas dalam pengawasan pengelolaan

keuangan daerah. Sebagai lembaga legislatif DPRD harus melaksanakan pengawasan sebaik mungkin dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penganggaran.

2.2 Pengembangan Hipotesis

2.2.1 Kualitas Anggaran dan Pengawasan Anggaran

Anggaran adalah hal penting dalam menjamin terlaksananya strategi dan program suatu organisasi dengan efektif dan efisien. Hal ini menjadi syarat utama tercapainya tujuan dan sasaran sebuah organisasi, sehingga tingkat pencapaian tujuan dan sasaran suatu organisasi akan tergantung pada kualitas anggaran organisasi tersebut.

Pengawasan merupakan sebagai dari pengendalian yang penting untuk dilakukan agar pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran suatu organisasi dapat sesuai dengan yang direncanakan. Maka berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 pihak yang memiliki wewenang untuk mengawasi pelaksanaan APBD adalah DPRD.

Dalam penelitian ini akan menguji pengaruh kualitas anggaran (berdasarkan karakteristiknya) terhadap variabel dari pihak pengawas yaitu DPRD. Sama seperti penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Robinson (2006) maka kualitas anggaran diukur melalui karakteristik kejelasan, evaluasi dan keakuratan anggaran.

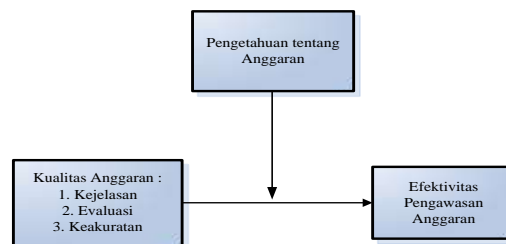
H_1 : Kualitas anggaran berpengaruh terhadap efektivitas pengawasan anggaran.

2.2.2 Peranan Pengetahuan tentang Anggaran dalam hubungan antara Kualitas Anggaran dan Pengawasan Anggaran: Pendekatan Kontinjensi

Pengetahuan yang spesifik mengenai anggaran akan mempengaruhi kinerja pihak pengawas yaitu, tingkat efektivitas pengawasan dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya dalam melakukan pengawasan. Penggunaan kerangka kontinjensi memungkinkan adanya variabel-variabel lain yang bertindak sebagai faktor *moderating* atau *intervening* yang mempengaruhi

hubungan antara kualitas anggaran dengan pengawasan anggaran (Robinson, 2006). Variabel *moderating* adalah variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan langsung antara variabel independen dan variabel dependen. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Robinson (2006) menunjukkan bahwa secara bersama-sama, kejelasan anggaran, evaluasi anggaran, dan keakuratan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengawasan anggaran. Sedangkan hasil uji interaksi menunjukkan bahwa pengetahuan tentang anggaran tidak berpengaruh signifikan dalam hubungan antara kualitas anggaran dan efektivitas pengawasan anggaran, tetapi pengetahuan tentang anggaran berpengaruh signifikan secara langsung terhadap efektivitas pengawasan anggaran.

H₂ : Pengetahuan tentang anggaran berpengaruh terhadap hubungan antara kualitas anggaran dan efektivitas pengawasan anggaran.



Gambar 2.1 Model Penelitian

BAB III METODELOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah metode desain kausal yaitu metode yang menganalisis bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya atau hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya.

1.2 Pemilihan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD di 12 Kabupaten dan 2 Kota se-Provinsi Lampung. Pengambilan sampel dilakukan dengan *metode purposive sampling* dengan kriteria responden penelitian sebagai berikut:

1. Kriteria anggota DPRD yang menjadi responden adalah anggota DPRD terlibat langsung dalam proses pembahasan, pengesahan, dan pengawasan terhadap anggaran maka sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah anggota Badan Anggaran DPRD.
2. Kriteria Kabupaten/ Kota yang menjadi sampel penelitian adalah Kabupaten induk dan Kabupaten hasil pemekaran.

1.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di delapan DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Waktu penelitian dilakukan dari tanggal 31 Januari 2013 hingga 22 Maret 2013. Saat penyebaran kuisisioner Tahun Anggaran 2013 telah memasuki triwulan pertama sehingga tahapan perencanaan, pembuatan, dan pengesahan APBD telah dilewati.

1.4 Variabel Penelitian

1. Variabel Independen

Variabel independen berupa kualitas anggaran (terdiri dari kejelasan anggaran, evaluasi anggaran dan keakuratan anggaran. Untuk mengukur ketiga karakteristik digunakan hasil modifikasi yang dilakukan oleh Robinson (2006) yang kemudian disesuaikan dengan Permendagri No. 13 tahun 2006.

2. Variabel *Moderating*

Variabel *moderating* berupa pengetahuan tentang anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut UU No. 32 Tahun 2004 adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Instrumen pengukuran pengetahuan anggaran dilakukan dengan menanyakan pengetahuan dan pemahaman anggota DPRD tentang RAPBD/APBD dalam konteks anggaran yang berbasis kinerja.

3. Variabel *Dependen*

Variabel *dependen* berupa pengawasan anggaran yang mengacu pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif dalam hal ini adalah DPRD, untuk mengawasi anggaran. Pengawasan anggaran diukur dengan pertanyaan yang dikembangkan peneliti sebelumnya Robinson (2006) dengan mengacu pada Peraturan Daerah tentang pengawasan, serta mempertimbangkan fungsi pengawasan pada tiap tahapan APBD mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga tahap pelaporan.

1.5 Alat Analisis Penelitian

1.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dipakai untuk memberikan gambaran umum mengenai demografi responden penelitian meliputi: jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan dan pengalaman menjadi anggota DPRD.

1.5.2 Uji Kualitas Data

Pengujian bertujuan untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan valid dan reliabel, sebab kebenaran data yang diolah sangat menentukan kualitas hasil penelitian. Pengujian dilakukan sebagai berikut:

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2005). Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan

dengan uji faktor analisis dengan *varimax rotation*. Untuk mengukur tingkat keterkaitan (*intercorelations*) di antara variabel dan kelayakan terhadap analisis faktor adalah *Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (Kaiser's MSA)* di atas 0,5 dan item yang dimasukkan dalam analisis faktor adalah item-item yang memiliki *loading factor* lebih dari 0,4 dan *eigenvalue* lebih besar dari 1.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk melihat reliabilitas masing-masing instrumen yang digunakan dengan *koefisien cronbach alpha*. Menurut Nunnally (1967) dalam Ghozali (2005) dinyatakan bahwa suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha* lebih dari 0,6.

1.5.3 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2005). Jika distribusi data normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Untuk memastikan kehandalan hasil uji normalitas digunakan pula uji statistik non-parametrik Kolmogorov Smirnov (K-S). Apabila nilai *Asymp Sig* lebih dari 0,05 maka data terdistribusi normal (Ghozali, 2005).

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independen*). Jika variabel *independen* saling berkorelasi maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel *independen* yang nilai korelasi antar sesama variabel *independen* sama dengan nol (Ghozali, 2005).

3. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homokedastisitas, dan jika berbeda maka disebut

heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang mengalami homokedastisitas (Ghozali, 2005).

4. Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Pada penelitian ini, uji autokorelasi dilakukan dengan menguji nilai Durbin-Watson dengan syarat $du < DW < 4-du$ (Ghozali, 2005).

1.5.4 Pengujian Hipotesis

1. Pengujian hipotesis 1 (H_1) akan digunakan analisis regresi berganda :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan: Y = Pengawasan Anggaran
 X_1 = Kejelasan anggaran
 X_2 = Keakuratan anggaran
 X_3 = Evaluasi anggaran
a = Konstanta (*intercept*)
 b_i = Koefisien regresi
e = Error

2. Pengujian hipotesis 2 (H_2) dilakukan dengan menguji pengaruh moderasi dengan menggunakan uji nilai selisih mutlak dari Frucot dan Shearon (1991).

$$Y = a + b_1X_{z1} + b_2X_{z2} + b_3X_{z3} + b_4X_{z4} + b_5 | X_{z1} - X_{z4} | + b_6 | X_{z2} - X_{z4} | + b_7 | X_{z3} - X_{z4} | + e$$

Keterangan: Y = Pengawasan anggaran
 X_{z1} = Nilai *standardized* kejelasan anggaran
 X_{z2} = Nilai *standardized* keakuratan anggaran
 X_{z3} = Nilai *standardized* evaluasi anggaran
 X_{z4} = Nilai *standardized* pengetahuan anggaran
a = Konstanta (*intercept*)
 b_i = Koefisien regresi
e = Error

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

Tabel 4.1
Hasil Analisis Pengembalian Kuesioner

| No | Keterangan | Jumlah |
|----|---|--------|
| 1 | Kuesioner yang dikirim kepada responden | 151 |
| 2 | Kuesioner yang tidak kembali | 19 |
| 3 | Kuesioner yang kembali tetapi tidak lengkap | 9 |
| 4 | Kuesioner yang kembali tetapi tidak memenuhi kriteria | 5 |
| 5 | Kuesioner yang kembali dan memenuhi syarat untuk analisis akhir | 118 |

Sumber : Data Primer yang diolah, 2013

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa jumlah kuesioner yang dikirim sebanyak 151 kuesioner dengan tingkat pengembalian 87,41%, sedangkan sisanya 12,58% tidak kembali. Jumlah kuesioner yang kembali tersebut selanjutnya hanya 78,14% kuesioner saja yang memenuhi kriteria.

1.2 Profil Responden

Tabel 4.2
Profil Responden

| Demografi | Jumlah | Proporsi |
|-------------------------------------|--------|----------|
| Jenis Kelamin : | | |
| Laki-laki | 104 | 88,14% |
| Perempuan | 14 | 11,86% |
| Usia : | | |
| 21 - 30 tahun | 11 | 9,32% |
| 31 - 40 tahun | 45 | 38,14% |
| 41 - 50 tahun | 48 | 40,68% |
| >51 tahun | 14 | 11,86% |
| Tingkat Pendidikan : | | |
| SMA | 31 | 26,27% |
| DIPLOMA | 7 | 5,93% |
| S1 | 71 | 60,17% |
| S2 | 9 | 7,63% |
| S3 | 0 | 0,00% |
| Pernah menjabat periode sebelumnya: | | |
| Pernah | 37 | 31,36% |
| Tidak Pernah | 81 | 68,64% |

Sumber : Data Primer yang diolah, 2013

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini adalah anggota Badan Anggaran yang mewakili dari total Badan Anggaran di masing-masing DPRD Kabupaten/Kota pada kisaran antara 73,91% hingga 88,24%. Sehingga secara keseluruhan, 123 anggota Badan Anggaran yang menjadi responden mewakili 81,46% dari total 151 anggota Badan Anggaran di delapan Kabupaten/ Kota yang ada di Provinsi Lampung.

Tabel 4.3
Data Responden Berdasarkan Kabupaten/Kota

| No. | Kabupaten/ Kota | Jumlah Badan Anggaran | Jumlah Data Diolah | Persentase |
|-----|---------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|
| 1. | Kota Bandar Lampung | 23 | 17 | 73,91% |
| 2. | Kabupaten Lampung Tengah | 22 | 18 | 81,82% |
| 3. | Kabupaten Lampung Selatan | 22 | 18 | 81,82% |
| 4. | Kota Metro | 15 | 12 | 80,00% |
| 5. | Kabupaten Tulang Bawang | 22 | 18 | 81,82% |
| 6. | Kabupaten Pesawaran | 17 | 15 | 88,24% |
| 7. | Kabupaten Mesuji | 13 | 10 | 76,92% |
| 8. | Kabupaten Pringsewu | 17 | 15 | 88,24% |
| | Total | 151 | 123 | 81,46% |

Sumber : Data Primer yang diolah, 2013

1.3 Statistik Deskriptif

Tabel 4.4
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

| | N | Range | Min | Max | Mean | Std. Deviation | Variance |
|-----------------------|-----|-------|-----|-----|-------|-------------------|----------|
| Kejelasan | 118 | 22 | 18 | 40 | 30.90 | 4.361 | 19.015 |
| Keakuratan | 118 | 13 | 12 | 25 | 18.94 | 2.593 | 6.723 |
| Evaluasi | 118 | 15 | 15 | 30 | 25.54 | 3.009 | 9.054 |
| Pengawasan | 118 | 21 | 19 | 40 | 31.14 | 3.670 | 13.469 |
| Pengetahuan | 118 | 25 | 25 | 50 | 40.14 | 4.273 | 18.261 |
| Valid N (listwise) | 118 | | | | | | |

Sumber : Data Primer yang diolah, 2013

1.4 Analisis Pengujian Kualitas Data

4.4.1 Hasil Uji Validitas

Pada tabel 4.5 terlihat bahwa variabel kejelasan anggaran terdiri dari delapan *item* pertanyaan berada pada kelompok 1, dengan faktor *loading* di atas 0,4. Variabel keakuratan anggaran terdiri dari lima *item* pertanyaan dengan faktor *loading* di atas 0,4. Variabel evaluasi anggaran terdiri dari enam *item* pertanyaan dengan faktor *loading* seluruh pertanyaan di atas 0,4. Variabel efektivitas pengawasan anggaran terdiri dari delapan *item* pertanyaan dan faktor *loading* di atas 0,4. Variabel pengetahuan anggaran sepuluh *item* pertanyaan dengan faktor *loading* di atas 0,4. Kemudian seluruh variabel memiliki *KMO-MSA* diatas 0,5 dan *eigenvalue* memiliki nilai lebih dari 1, jadi dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan dalam instrumen penelitian ini adalah valid.

Tabel 4.6
Hasil Pengujian Validitas

| No | Variabel | <i>KMO-MSA</i> | <i>Eigenvalue</i> | <i>Loading Faktor</i> | Keterangan |
|----|----------------------|----------------|-------------------|-----------------------|------------|
| 1 | Kejelasan Anggaran | 0,823 | 3,862 | 0,535-0,775 | Valid |
| 2 | Keakuratan Anggaran | 0,784 | 2,742 | 0,648-0,832 | Valid |
| 3 | Evaluasi Anggaran | 0,840 | 3,225 | 0,657-0,784 | Valid |
| 4 | Pengawasan Anggaran | 0,768 | 3,177 | 0,439-0,750 | Valid |
| 5 | Pengetahuan Anggaran | 0,862 | 4,666 | 0,596-0,725 | Valid |

Sumber : Data Primer yang diolah, 2013

4.4.2 Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 4.7
Hasil Uji Reliabilitas

| Variabel | Cronbach's Alpha | Keterangan |
|----------------------|------------------|------------|
| Kejelasan Anggaran | 0,843 | Reliabel |
| Keakuratan Anggaran | 0,790 | Reliabel |
| Evaluasi Anggaran | 0,824 | Reliabel |
| Pengawasan Anggaran | 0,773 | Reliabel |
| Pengetahuan Anggaran | 0,870 | Reliabel |

Sumber : Data Primer yang diolah, 2013

1.5 Analisis Pengujian Asumsi Klasik

4.5.1 Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 4.8
Hasil Pengujian Multikolinearitas

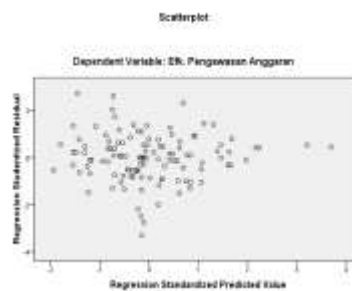
| Variabel | <i>Tolerance</i> | <i>VIF</i> | Keterangan |
|----------------------|------------------|------------|----------------------------------|
| Kejelasan Anggaran | 0,975 | 1,025 | Tidak Terjadi Multikoliniearitas |
| Keakuratan Anggaran | 0,893 | 1,119 | Tidak Terjadi Multikoliniearitas |
| Evaluasi Anggaran | 0,849 | 1,178 | Tidak Terjadi Multikoliniearitas |
| Pengetahuan Anggaran | 0,927 | 1,078 | Tidak Terjadi Multikoliniearitas |

Sumber : Data SPSS yang diolah, 2013

Dari hasil perhitungan nilai *tolerance* menunjukkan seluruh variabel independen mempunyai nilai lebih besar dari 0,10 dan nilai *VIF* dari semua variabel independen mempunyai nilai kecil dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan model regresi tersebut tidak terdapat problem multikolinearitas. Maka model regresi yang ada layak untuk dipakai.

4.5.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Gambar 4.1
Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

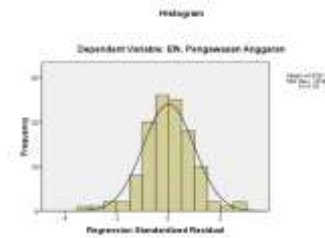


Sumber : Hasil output SPSS, 2013

Hasil pengujian heteroskedastisitas menunjukkan bahwa grafik *scatterplot* tidak membentuk pola yang teratur seperti bergelombang, melebar ataupun menyempit, melainkan menyebar di atas maupun di bawah nilai nol pada sumbu Y sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian tidak terjadi heteroskedastisitas atau model regresi mengalami homoskedastisitas.

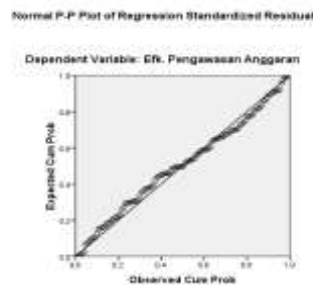
4.5.3 Hasil Uji Normalitas

Gambar 4.2
Hasil Pengujian Normalitas



Sumber : Hasil output SPSS, 2013

Gambar 4.3
Hasil Pengujian Normalitas



Sumber : Hasil output SPSS, 2013

Tabel 4.9
Hasil Pengujian Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

| | | Unstandardized Residual |
|--------------------------------|----------------|-------------------------|
| N | | 118 |
| Normal Parameters ^a | Mean | .0000000 |
| | Std. Deviation | 3.61563697 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .062 |
| | Positive | .053 |
| | Negative | -.062 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | | .675 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .753 |

a. Test distribution is Normal.

Sumber : Data SPSS yang diolah, 2013

Pada Gambar 4.3 dapat dilihat bahwa antara data observasi dengan distribusi mendekati distribusi normal. Selain itu pada Gambar 4.4 terlihat bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal yaitu menunjukkan pola distribusi normal. Tabel 4.8 juga menunjukkan bahwa *Asymp Sig (2-tailed)* memiliki nilai $0,753 > 0,05$ yang berarti bahwa asumsi normalitas terpenuhi.

4.5.4 Hasil Uji Autokorelasi

Tabel 4.10
Hasil Pengujian Autokorelasi

| Durbin-Watson | du (k=4) | du < DW < 4 - du | Keterangan |
|---------------|----------|-----------------------------|----------------------------|
| 1,925 | 1,77 | $1,770 < 1,925 < 4 - 1,770$ | Tidak terjadi autokorelasi |

Sumber : Data SPSS yang diolah, 2013

Pada hasil pengujian autokorelasi di atas menunjukkan bahwa nilai DW berada di antara du dan 4-du, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat gejala autokorelasi.

4.6 Pengujian Hipotesis

4.6.1 Pengujian Hipotesis Pertama

Tabel 4.11
Hasil Pengujian Hipotesis 1

| Variabel | Nilai Koefisien | Standard Error | t-value | p-value | Ket |
|---|-----------------|----------------|---------|---------|-----|
| Konstanta | 36,539 | 4,114 | 8,881 | 0,000 | SS |
| Kejelasan Anggaran | 0,001 | 0,079 | 0,016 | 0,987 | TS |
| Keakuratan Anggaran | -0,055 | 0,138 | -0,0402 | 0,689 | TS |
| Evaluasi Anggaran | -0,172 | 0,118 | -0,455 | 0,148 | TS |
| $R^2=0,025$ $F=0,957$ $p=0,416$ $N=118$ SS=Statistis Signifikan TS=Tidak Signifikan | | | | | |

Sumber : Data Primer yang diolah, 2013

Tabel 4.11 menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi yang ditunjukkan oleh nilai R^2 adalah sebesar 0,025 yang berarti variabilitas pengawasan anggaran yang dapat dijelaskan oleh variabel kualitas anggaran adalah sebesar 2,5% sedangkan

sisanya yakni 97,5% dijelaskan oleh variabel lain diluar model ini. Hal ini menunjukkan bahwa sangat kecil pengaruh kualitas anggaran terhadap pengawasan pelaksanaan anggaran. Hal ini terjadi karena adanya variabel-variabel lainnya yang diduga dapat mempengaruhi hubungan antar variabel dalam model penelitian ini, seperti aturan perundang-undangan dan peran lembaga pengawas dan pemeriksa lainnya.

Kemudian dari ketiga variabel yang dimasukkan ke dalam model regresi ketiga variabel menunjukkan bahwa tingkat probabilitas signifikansi lebih besar dari 0,05. Dimana tingkat signifikansi kejelasan anggaran 0,987, tingkat signifikansi keakuratan anggaran 0,689 dan tingkat signifikansi evaluasi anggaran 0,148. Persamaan regresi yang dihasilkan yaitu $Y = 36,539 + 0,001X_1 - 0,055X_2 - 0,172X_3$ namun tidak dapat digunakan untuk memprediksi variabel efektivitas pengawasan anggaran karena secara statistik tidak signifikan. Sehingga hasil pengujian tidak mendukung hipotesis 1 yang diajukan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kualitas APBD di 8 Kota/Kabupaten se-Provinsi Lampung tidak mempengaruhi efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD terhadap anggaran tersebut. Hal ini tentu bertentangan dengan konsep pengendalian manajemen menyebutkan bahwa penyusunan anggaran merupakan tahapan yang penting dalam proses pengendalian manajemen dimana anggaran menjadi hal penting dalam menjamin strategi dan program terlaksana secara efektif dan efisien (Mardiasmo, 2002).

Hasil pengujian ini bertentangan dengan penelitian terdahulu oleh Kenis (1979) dan Collins (1978) yang hasilnya menunjukkan bahwa secara keseluruhan karakteristik anggaran (kejelasan, keakuratan dan evaluasi) berperan penting/berkorelasi positif dan signifikan terhadap peningkatan sikap/perilaku terhadap anggaran, hal ini mungkin terjadi karena perbedaan objek dimana Collins dan Kenis menggunakan objek sektor privat sedangkan didalam penelitian ini objek adalah sektor publik.

Hasil penelitian ini juga berbeda dengan hasil penelitian Robinson (2006) yang menunjukkan hasil bahwa kualitas anggaran (kejelasan anggaran, keakuratan

anggaran, dan evaluasi anggaran) berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengawasan anggaran. Hasil yang berbeda ini sangat dimungkinkan karena perbedaan objek, responden, dan kondisi yang berbeda disebabkan perubahan UU dan kebijakan pemerintah.

Selanjutnya dengan melihat opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Kabupaten/Kota yang menjadi sampel dalam penelitian dimana didapatkan empat dari sampel mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tiga dari sampel mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan satu mendapat pernyataan Tidak Memberikan Pendapat ((*Disclaimer*)). Berarti dalam faktanya terdapat kesenjangan keadaan antar responden, hal ini tentu akan mempengaruhi interval jawaban antara masing-masing responden. Walaupun dari statistik deskriptif dapat dilihat sebagian besar responden menjawab setuju/ memahami namun responden yang menjawab setuju/tidak memahami akan mempengaruhi hasil pengujian hipotesis walaupun jumlahnya sedikit sehingga hal ini menimbulkan bias saat pengujian hipotesis.

4.6.2 Pengujian Hipotesis Kedua

Tabel 4.12
Hasil Pengujian Hipotesis 2

| Variabel | Nilai Koefisien | Standard Error | t-value | p-value | Ket |
|--|-----------------|----------------|---------|---------|-----|
| Konstanta | 30,343 | 0,693 | 48,813 | 0,000 | SS |
| Zscore (Kejelasan) | 0,002 | 0,374 | 0,005 | 0,996 | TS |
| Zscore (Keakuratan) | -0,115 | 0,368 | -0,312 | 0,756 | TS |
| Zscore (Evaluasi) | -0,509 | 0,389 | -1,306 | 0,194 | TS |
| Zscore (Pengetahuan) | 0,357 | 0,372 | 0,960 | 0,339 | TS |
| AbsX1-X4 | 0,220 | 0,414 | 0,531 | 0,596 | TS |
| AbsX2-X4 | 0,100 | 0,452 | 0,221 | 0,825 | TS |
| AbsX3-X4 | 0,462 | 0,507 | 0,912 | 0,364 | TS |
| R ² =0,046 F=0,762 p=0,620 N=118 SS=Statistis Signifikan TS=Tidak Signifikan | | | | | |

Sumber : Data Primer yang diolah, 2013

Tabel 4.13 menunjukkan nilai R² sebesar 0,046. Hal ini berarti bahwa variasi perubahan efektivitas pengawasan anggaran hanya bisa dijelaskan oleh variabel independen yang terdiri dari kualitas anggaran (keakuratan anggaran, kejelasan

anggaran, evaluasi anggaran), pengetahuan anggaran, dan kesesuaian antara kualitas anggaran dengan pengetahuan anggaran sebesar 4,6%, sedangkan sisanya 95,4% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa tingkat signifikansi dari seluruh variabel lebih besar dari 0,05.

Persamaan regresi yang dihasilkan yaitu $Y=30,343+0,003X_{z1}-0,115X_{z2}-0,509X_{z3}+0,357X_{z4}+0,22 | X_{z1}- X_{z4} | +0,1 | X_{z2}- X_{z4} | +0,462 | X_{z3}- X_{z4} | +e$.

Namun persamaan tersebut tidak dapat digunakan untuk memprediksi variabel efektivitas pengawasan anggaran karena secara statistik keseluruhan model tidak signifikan. Sehingga hasil pengujian menolak hipotesis 2, yaitu pengetahuan tentang anggaran tidak berpengaruh terhadap hubungan antara kualitas anggaran dengan pengetahuan anggota DPRD akan mempengaruhi efektivitas pengawasan anggaran.

Ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan pelaksanaan APBD tahun 2013 yang dilakukan anggota DPRD di 8 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung tidak dimoderasi oleh tingkat pengetahuan tentang anggaran. Hasil penelitian sama seperti penelitian sebelumnya oleh Robinson (2006) dimana variabel pengetahuan anggaran bukanlah variabel *moderating* terhadap hubungan kualitas anggaran. Namun bertolak dengan yang dinyatakan oleh Shunn (1999) yang menyatakan bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang baik yang bersifat umum maupun spesifik akan mempengaruhi kinerjanya dalam menjalankan tugas. Hasil ini berbeda dengan pernyataan Shunn ini sangat dimungkinkan kurang luasnya responden penelitian ini dan pengukuran instrumen penelitian yang cenderung menimbulkan bias.

Sama seperti halnya hipotesis satu perbedaan interval jawaban responden yang terlalu jauh dengan melihat keadaan responden yang berbeda di setiap Kota/ Kabupaten yang dapat terlihat dari opini yang diberikan BPK terhadap setiap daerah. Hal ini tentu menimbulkan bias walaupun responden cenderung menjawab setuju/ memahami namun hipotesis dalam penelitian ini ditolak.

BAB V PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Diperoleh simpulan sebagai berikut :

1. Hasil pengujian hipotesis 1 menunjukkan bahwa kualitas anggaran (kejelasan, evaluasi dan keakuratan) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengawasan anggaran. Sehingga penelitian ini menolak hipotesis 1 yang menyebutkan bahwa kualitas anggaran (kejelasan, keakuratan dan evaluasi anggaran) berpengaruh positif terhadap efektivitas pengawasan anggaran, hal ini berarti kualitas anggaran tidak meningkatkan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD terhadap anggaran yang dilaksanakan.
2. Berdasarkan hasil analisis uji nilai selisih absolut dalam pengujian hipotesis 2, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel pengetahuan tentang anggaran tidak berpengaruh atau bukan sebagai variabel *moderating* dalam hubungan antara kualitas anggaran terhadap pengawasan anggaran.

1.2 Implikasi

Dari data yang diperoleh diketahui bahwa tingkat pengetahuan tentang anggaran dari anggota badan anggaran di DPRD Kabupaten dan Kota se-Provinsi Lampung sangat baik (61,9% responden memiliki pengetahuan di atas rata-rata). Semakin baik pengetahuan tentang anggaran maka diharapkan mampu menghasilkan anggaran yang berkualitas pula. Hasil penelitian ini setidaknya dapat memotivasi penelitian selanjutnya di masa yang akan datang terutama yang berkaitan dengan instansi sektor publik lainnya.

1.3 Keterbatasan

Keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan populasi dan sampel yang diambil dalam penelitian ini, sehingga untuk dapat menjelaskan kondisi secara umum hasil penelitian ini harus mempertimbangkan banyak faktor atau asumsi-asumsi yang lainnya.
2. Kemungkinan masih adanya variabel-variabel lain yang diduga berpengaruh terhadap pengawasan anggaran namun belum digunakan dalam penelitian ini,

seperti peran lembaga pemeriksa, peran lembaga pengawas, aturan perundang-undangan, kebijakan transparansi dan akuntabilitas.

3. Metode survei yang digunakan dalam penelitian ini tanpa dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan secara lisan. Sehingga jawaban responden belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan kemungkinan akan berbeda jika data diperoleh dengan cara wawancara.
4. Instrumen yang digunakan untuk mengukur mengacu pada pengukuran diri sendiri (*self rating*) sehingga cenderung menimbulkan *leniency bias* (kemurahan hati dalam menilai diri sendiri).

1.4 Saran

1. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan instrumen ukuran variabel yang lebih objektif agar tidak menghasilkan hasil pengukuran yang bias.
2. Penelitian yang akan datang diharapkan menggunakan populasi dan sampel yang lebih luas sebagai responden agar hasilnya lebih dapat menjelaskan kondisi secara umum.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel-variabel lain seperti peran lembaga pemeriksa, peran lembaga pengawas, aturan perundang-undangan dan kebijakan transparansi dan akuntabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, R.N. dan V. Govindarajan. 2004. *Management Control Systems*, Eleventh Edition, McGraw-Hill Companies, Inc. U.S.A
- Collins, Frank. 1978. The Interaction of Budget Characteristics and Personality Variabels with Budgetary Response Attitudes. *The Accounting Review*. Vol. LIII, No.2, April. pp.324-335.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi 3. Jakarta : Balai Pustaka
- Frucot, V dan Shearon, W.T. 1991. Budgetary Participation, Locus of Control, and Mexican Managerial Performance and Job Satisfaction. *The Accounting Review*. Vol 6, No. 1, January.
- Goetsch, D.L & Davis, S, 1994. *Introduction to Total Quality, Quality, Productivity, Competitiveness*. Englewood Cliffs. NJ. Prentice Hall International Inc.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Univesitas Diponegoro. Semarang
- Hansen, Don R. dan M.M. Mowen. 2003. *Management Accounting*. 6 th Edition, South-Western College Publishing.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Manajemen dan Akuntansi*. BPFE. Yogyakarta.
- Juran, J.M. 1989. *Juran on Leadership for Quality*. The Free Press. MacMillan, Inc. E. Nugroho (penterjemah). 1995. *Kepemimpinan Mutu*. Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta.
- Kenis, Izzetin. 1979. Effects of Budgetary Goal Characteristics on Managerial Attitudes and Performance. *The Accounting Review*. Vol. LIV, No.4, October. pp. 707-721.
- Kotler, P. 2002. *Marketing Management*. 10 th edition. Prentice Hall, Inc. New Jersey. H. Teguh, R.A. Rusli, dan B. Molan (penterjemah). 2004. *Manajemen Pemasaran*, edisi 10. PT. Indeks. Jakarta.
- Lubis, Arfan Ikhsan. 2010. *Akuntansi Keperilakuan*. Salemba Empat. Jakarta
- Lunenburg, Fred C. 2011. Goal-Setting Theory of Motivation. *International Journal of Management, Business, and Administration*. Vol. 15, No.1. pp. 1-6.

- Locke, Edwin A. & Latham, Gary P. 2006. New Directions in Goal Setting Theory. *Journal of Association Psychological Science*. Vol 15, No. 5. pp. 265-268.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah* . Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah* . Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah* . Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
- _____. *Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
- _____. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Render, Barry and Jay Herizer, 2004. *Operations Management, International Edition*. Pearson Education, Inc. Upper Saddle River. New Jersey.
- Robinson, 2006. Pengaruh Kualitas Anggaran Terhadap Efektifitas Pengawasan Anggaran : Pengetahuan Tentang Anggaran Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada DPRD Kabupaten & Kota Se-Provinsi Bengkulu). *Tesis Pasca Sarjana Universitas Diponegoro*. Semarang.
- Rudini. 1993. *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta
- Sofyan, Iban. 2010. *Penganggaran Perusahaan*. Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Lampung. Lampung
- Sri H dan Anik Y. 2007. Organizational Commitmen Memperkuat Budget Participation. *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 7, No.2, September. pp.31-43

Shunn, C.D 1999. The Generality/Specificity of Expertise in Scientific Reasoning
Cognitive Science. 13. pp. 337-370.

Tjandra, W. Riawan. 2009. *Hukum Keuangan Negara*. PT Gramedia Widiasarana
Indonesia. Jakarta

Umar, Husein. 2003. *Metodelogi Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. PT.
Raja Grafindo Persada. Jakarta

Universitas Lampung, 2009. *Format Penulisan Karya Ilmiah* .Penerbit
Universitas Lampung, Bandar Lampung.

www.bandarlampung.bpk.go.id diakses pada Selasa, 14 Mei 2013 pukul 22.23.